

**LAMPIRAN B
HARGA DAN PEMBAYARAN
(CONTRACT PRICE AND TERMS OF PAYMENT)**

**KONTRAK
NOMOR : A00000XXXX/XXX/XXX/2022**

**TENTANG
JASA BORONGAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SHIP-UNLOADER & BELT
CONVEYOR**

PASAL 1 - DESKRIPSI PEKERJAAN

Pekerjaan yang diatur dalam Kontrak ini adalah Jasa Borongan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Ship-Unloader & Belt Conveyor.

PASAL 2 - KUANTITAS PEKERJAAN

Kuantitas pekerjaan yang diatur dalam Kontrak ini adalah 1 (satu) Paket Jasa Borongan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Ship-Unloader & Belt Conveyor.

PASAL 3 - HARGA KONTRAK

Rp XXXX (XXXXX) ("Harga Kontrak")

No	Nama Pekerjaan	Quantity 2 Tahun (Ton)	Harga /Ton (Rp)	Total Harga 2 (dua) Tahun (Rp)
1	Jasa Borongan Pengoperasian dan Pemeliharaan Ship Unloader dan Belt Conveyor	XXX	XXX	XXX
TOTAL				XXX

PASAL 4 - BIAYA PENGIRIMAN DAN PENANGANAN (HANDLING)

Harga sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Lampiran ini sudah termasuk biaya pengiriman dan penanganan (*handling*).

PASAL 5 - MATA UANG YANG DIGUNAKAN

PARA PIHAK sepakat mata uang yang digunakan untuk seluruh atau sebagian pembayaran atas Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini, menggunakan mata uang Rupiah (IDR).

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

PASAL 6 - PENGENAAN PAJAK DAN TARIF YANG BERLAKU

- 6.1. Segala bentuk dokumentasi perpajakan **PIHAK PERTAMA** menggunakan nama PT ANEKA TAMBANG, Jl. Letjen TB Simatupang, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan DKI Jakarta Raya - 12530, dengan NPWP 01.001.663.2.051.000.
- 6.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai peraturan perundang-undangan menjadi beban **PIHAK PERTAMA**. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPN tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** ke instansi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi NPWP **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap pengajuan permintaan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 6.3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembayaran semua pajak-pajak yang dikenakan terhadap **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- 6.4. **PIHAK PERTAMA** akan memungut langsung Pajak Penghasilan (PPH) atas Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran berdasarkan tagihan yang disampaikan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan copy bukti pemotongan PPh melalui **PIHAK PERTAMA**.
- 6.5. Apabila akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** diharuskan melalui suatu penetapan pajak yang final untuk membayar suatu pajak atau pungutan lainnya sebagai akibat Kontrak ini, termasuk suatu denda atau bunga yang berlaku, atas beban atau atas nama **PIHAK KEDUA** atau Sub**PIHAK KEDUA**nya yang mana saja atau para pegawai kedua-duanya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memotong dari setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** harus mengganti sejumlah yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** secara penuh dan tunai untuk jumlah yang masih tersisa setelah pemotongan demikian dilakukan.

PASAL 7 - PEMBAYARAN

- 7.1. Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 Lampiran ini dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan realisasi hasil Pekerjaan yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Lampiran ini;
- 7.2. Pembayaran **PIHAK PERTAMA** atas tagihan **PIHAK KEDUA** berdasarkan realisasi hasil kerja **PIHAK KEDUA** per bulan yang disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BA-STP) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 7.3. Tagihan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **satuan kerja Treasury & Verification**, atau satuan kerja lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu tanpa mengubah Kontrak.

Lampiran B

Kontrak No. A00000XXXX/XXX/XXX/2022 tentang Jasa Borongan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Ship-Unloader & Belt Conveyor
PT ANTAM Tbk – PT XXX

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

PASAL 8 - CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

- 8.1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima tagihan dengan seluruh dokumen yang disyaratkan secara lengkap dan benar sesuai persyaratan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Lampiran ini sesuai dengan realisasi tonase pembongkaran (Ton) melalui SUBC dikalikan dengan harga satuan (Rp/Ton) yang disepakati dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan laporan pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

No	Lokasi Dumping Point	Realisasi Tonase (Ton) (a)	Harga Satuan (Rp/Ton) (b)	Total Harga (Rp) (c)
1	Jetty – Stockyard Tripper/PLTU/Pabrik	a	b	$c = a \times b$

Catatan:

- Memberikan Penghasilan yang merupakan hak-hak tenaga kerja yang timbul karena hasil kerja tenaga yang diketahui oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya tanpa harus menunggu pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**, apabila tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur (sabtu, Minggu & libur nasional) dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
 - PIHAK PERTAMA** tidak memberikan uang DP (Down Payment), pembayaran dilakukan setelah invoice beserta bukti-bukti dan dokumen pendukung dari **PIHAK KEDUA** dinyatakan lengkap dari **PIHAK PERTAMA**.
- 8.2. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer yang akan dikirimkan ke rekening Bank **PIHAK KEDUA**, yaitu;
- Nama Bank : **PT Bank XXX**
 Nomor Rekening : **XXX**
 Atas Nama : **PT. XXX**
- 8.3. Segala biaya yang timbul akibat atau terkait pembayaran, termasuk biaya transfer menjadi beban **PIHAK KEDUA** yang akan diperhitungkan pada setiap pembayaran.
- 8.4. Segala perubahan terkait rekening sebagaimana tersebut dalam ayat 8.2. Pasal ini akan dituangkan dalam amandemen Kontrak. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala akibat yang timbul karena perubahan terkait rekening sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan, klaim, gugatan dan/atau permohonan, atau tindakan sejenisnya terkait dengan akibat dan/atau kerugian yang timbul dari perubahan rekening tersebut.
- 8.5. Apabila **PIHAK KEDUA** belum menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK**

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

PERTAMA dan **PIHAK PERTAMA** dengan adanya permintaan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** wajib memberikan segala dokumentasi yang membuktikan bahwa segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran tersebut telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya atas nama **PIHAK PERTAMA** (antara lain bank). Segala keterlambatan dalam sistem perbankan terkait dengan transfer pembayaran tersebut tidak dapat memberikan hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan klaim dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud, dengan ketentuan bahwa segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini. Segala biaya yang terkait dengan tidak sampainya dana tersebut yang tidak disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungan dan beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 - TAGIHAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG

9.1. Penagihan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sesuai Kontrak ini dilakukan melalui **satuan kerja Treasury & Verification PIHAK PERTAMA**. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Lampiran B ini, permintaan pembayaran dilengkapi dokumen yang tersusun rapi dengan urutan dokumen sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP);
- 2) Receiving report dari sistem ERP **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Salinan atau foto copy Kontrak;
- 4) PO asli (untuk pembayaran non termin);
- 5) Kuitansi asli bermeterai cukup rangkap 2 (dua);
- 6) Invoice / Faktur asli rangkap 2 (dua);
- 7) Faktur Pajak / PPN yang telah diisi sebagai bukti pembayaran;
- 8) Bukti pembayaran pajak atas pembayaran invoice terakhir dengan melampirkan SPT masa (formulir 1111 dan 1111 A2);
- 9) Salinan atau foto copy Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku;
- 10) Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu dan diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.

9.2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin keaslian, kebenaran, keakuratan serta keabsahan seluruh dokumen yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen pendukung yang disyaratkan untuk penagihan sesuai dengan Pasal ini. Dalam hal dokumen yang diserahkan adalah berbentuk fotokopi, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa fotokopi tersebut adalah benar dan sesuai dengan aslinya. Pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala akibat yang timbul terkait dengan hal tersebut, termasuk segala klaim, gugatan, tuntutan, perintah pembayaran dan kerugian. Ketentuan denda maksimal tidak berlaku atas pelanggaran pernyataan dan jaminan dalam ayat ini.

PASAL 10 – JAMINAN PELAKSANAAN

10.1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) dari Bank yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum atau selambat-lambatnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Kontrak Utama, yang wajib dapat

Lampiran B
 Kontrak No. A00000XXXX/XXX/XXX/2022 tentang Jasa Borongan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Ship-Unloader & Belt Conveyor
 PT ANTAM Tbk – PT XXX

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini. Jaminan Pelaksanaan mana wajib diterbitkan oleh bank nasional terkemuka atau bank BUMN, dan bukan oleh bank perkreditan rakyat, dan wajib memuat ketentuan yang secara tegas mengesampingkan keberlakuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana penerbit jaminan pelaksanaan pekerjaan mengesampingkan haknya untuk menuntut barang-barang **PIHAK KEDUA** disita dan dijual terlebih dahulu untuk membayar **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** wajib dan menjamin memastikan Bank penerbit Jaminan Pelaksanaan mengesampingkan pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dengan ini **PIHAK KEDUA** melepaskan dan mengganti rugi **PIHAK PERTAMA** dari segala sesuatu (termasuk namun tidak terbatas pada klaim, permintaan eksekusi terlebih dahulu atas harta **PIHAK KEDUA**, gugatan, tuntutan dari pihak manapun) yang muncul akibat atau terkait dengan kelalaian **PIHAK KEDUA** tersebut dan/atau pelaksanaan pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- 10.2. Besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10.1. pasal ini adalah setidaknya 5% (lima persen) dari Harga Kontrak, yang mana nominal tersebut wajib disesuaikan oleh **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kenaikan Harga Kontrak. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan yang berlaku terus menerus dari sejak penandatanganan Kontrak atau sejak Kontrak ini berlaku sampai dengan setidaknya 2 (dua) bulan setelah seluruh Pekerjaan selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. Kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala hal akibat atau terkait dengan hal tersebut, termasuk memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk menahan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sejumlah Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) yang terhutang dan seharusnya diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 10.3. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk segera mencairkan jumlah apapun dalam dan berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dalam hal (i) **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan/tidak melaksanakan penyerahan barang/jasa, serta dilakukan terminasi Kontrak karena kegagalan tersebut dan/atau **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan; dan/atau (ii) **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah menerima surat penunjukan pemenang dan/atau menandatangani Kontrak/PO; dan/atau (iii) Kontrak diakhiri sehubungan dengan wanprestasi **PIHAK KEDUA**.
- 10.4. Kecuali dalam hal telah dicairkan berdasarkan Pasal ini, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) akan diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh Pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BA-STP) pada akhir Pekerjaan telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengambilan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang mewakili **PIHAK KEDUA** berdasarkan anggaran dasar atau kuasanya yang sah yang dibuktikan dengan surat kuasa. Kelalaian, kesalahan dan/atau pelanggaran **PIHAK KEDUA** terhadap ketentuan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala hal, termasuk gugatan, tuntutan, gangguan, biaya (termasuk biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan **PIHAK PERTAMA**) atau klaim dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan kelalaian, kesalahan dan/atau pelanggaran **PIHAK KEDUA** tersebut.
- 10.5. Jika terjadi perubahan/penambahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, kenaikan

Lampiran B

Kontrak No. A00000XXXX/XXX/XXX/2022 tentang Jasa Borongan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Ship-Unloader & Belt Conveyor
PT ANTAM Tbk – PT XXX

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

Harga Kontrak, dan/atau jika **PIHAK PERTAMA** menganggap perlu sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyesuaikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) berakhir agar memenuhi ketentuan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat 10.2. Lampiran ini. Kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam menyesuaikan jangka waktu ataupun nominal Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala hal, termasuk gugatan, tuntutan, gangguan, biaya (termasuk biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan **PIHAK PERTAMA**) atau klaim dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan hal tersebut, termasuk memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk menahan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sejumlah Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) yang seharusnya diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan selesainya seluruh pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

- 10.6. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk dan dengan ini **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (apabila diperlukan untuk melaksanakan ketentuan ini) kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan atau dinilai tidak dapat melaksanakan kewajiban atau tanggungjawabnya (termasuk pekerjaan yang menjadi lingkungannya) sesuai dengan Kontrak ini, termasuk dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak oleh **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 - KETENTUAN SANKSI DAN DENDA

- 11.1. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat dan/atau tidak melaksanakan seluruh dan/atau sebagian Pekerjaan sesuai kesepakatan dalam Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberlakukan sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini dengan ketentuan denda tersebut dipotong dari pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan pilihan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 11.2. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi dan denda-denda kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
- Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan baik sebagian ataupun seluruhnya, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengenakan denda sebesar 2‰ (dua perseribu) perhari kalender dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN 10 % (sepuluh persen). Denda dalam hal terjadi keterlambatan tersebut maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN 10 % (sepuluh persen) dalam hal keterlambatan terjadi lebih dari 25 hari kalender. Denda tersebut wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atau dipotong dari pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kebijakan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 11.3. Tanpa mengesampingkan ayat (2) Pasal ini, dalam hal jika terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** terkait besaran denda, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menunda pembayaran

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

(penundaan mana bukan merupakan pelanggaran dari Kontrak ini) sampai dengan perselisihan tersebut selesai.

- 11.4. Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa ***under review, suspend, blacklist***, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- 11.5. Ketentuan mengenai sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak dan/atau mengganti kerugian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk lain sehubungan dengan adanya pelanggaran **PIHAK KEDUA** atas Kontrak ini dan/atau terkait dengan adanya kerugian **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 - PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin:

- 12.1. Kontrak telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan mengikat **PIHAK KEDUA**.
- 12.2. Telah memperoleh semua persyaratan dan perizinan yang diperlukan terkait penandatanganan Kontrak dan pelaksanaan Kontrak dan akan selalu mempertahankan semua perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya dalam Kontrak.
- 12.3. **PIHAK KEDUA** sanggup dan akan melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil Pekerjaan.

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	